

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program pembangunan secara konsisten dan spesifik. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD yang akan dituangkan kedalam rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan *inheren*, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan antara lain diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan yang bermuara pada peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Rembang, peningkatan kualitas tenaga kerja yang handal dan berdaya saing, serta perwujudan kesejahteraan yang meningkat bagi masyarakat Rembang.
2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal antara lain diarahkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sinergitas dan sinkronisasi hubungan

antar perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Rembang, yang didukung dengan penguatan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat dan inovatif, penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang baik sebagai wujud pelayanan yang optimal bagi masyarakat Rembang.

3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud dari reformasi birokrasi dalam menunjang kinerja yang optimal, dengan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya aparatur, optimalisasi penggunaan teknologi informasi serta kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dengan mengedepankan prinsip *good governance* di lingkungan internal pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan antara lain diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah sebagai wujud kemandirian daerah yang didukung oleh pengelolaan keuangan yang transparan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di jajaran pemerintah Kabupaten Rembang, kebijakan juga diarahkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran, efisiensi belanja yang didasarkan pada penyelenggaraan standar akuntansi pemerintah yang baik.

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Rembang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 54/2010 minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Perangkat Daerah berkenaan.
- c. Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
- d. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan berbasis Misi Pembangunan daerah, yaitu:

7.2.1. Program Unggulan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”***, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, aspiratif dan partisipatif.
2. Membangun sistem pemerintahan sesuai norma pemerintahan yang baik, cepat tanggap, dan transparan.
3. Konsolidasi Birokrasi :
 - a. Penajaman Visi Misi kepada seluruh jajaran birokrasi.
 - b. Membuat Kontrak Kerja Kinerja yang harus ditandatangani oleh pejabat SKPD.
 - c. Memperpendek waktu pengurusan perijinan di KPPT

4. Membentuk Tim Penasehat Reformasi Birokrasi, Hukum, dan Ekonomi dari Perguruan Tinggi.

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi pertama ini adalah:

1. Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
2. Program Peningkatan disiplin aparatur
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
5. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
10. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12. Program kerjasama informasi dan media massa
13. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
14. Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
15. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
16. Program Kerjasama Pembangunan
17. Program perencanaan pembangunan daerah
18. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
19. Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
20. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum
21. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

7.2.2. Program Unggulan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu ***“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”***, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Membangun pasar tradisional semi modern, tanpa membebani pedagang di kecamatan Rembang, Pamotan, Lasem, Pandangan, Kragan, Sarang, Gunem dan Sale.
2. Membangun industri padat karya baik melalui kemitraan maupun investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Membuat 1.000 sumur dangkal
4. Memberikan bantuan modernisasi alat pertanian kepada petani :
 - a. 882 traktor tangan
 - b. 294 mesin tanam
 - c. 294 mesin panen

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kedua ini adalah:

1. Pembinaan Industri
2. Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif
4. Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
5. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi
8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha
11. Program Pembinaan Pedagang
12. Program Penanggulangan kemiskinan
13. Program Penataan Struktur Industri

14. Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin
15. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
16. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
17. Program pengelolaan TPI terpadu
18. Program Pengembangan Agribisnis
19. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
20. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
21. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
22. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
23. Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian
24. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
26. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
27. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa
28. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
29. Program Pengembangan Sistem Distribusi
30. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
31. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
32. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
34. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
35. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
36. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (Banlat dan Pelatihan)
37. Program Peningkatan Kemetrolgian dan perlindungan Konsumen
38. Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan
39. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

40. Program peningkatan kesempatan kerja
41. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
42. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
43. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
44. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
45. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
46. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
47. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
48. Program Peningkatan Produksi Pertanian
49. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
50. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
51. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
52. Program Promosi produk unggulan daerah
53. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
54. Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting

7.2.3. Program Unggulan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu ***“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif”***, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Membangun industri berbasis rumah tangga dengan orientasi sektor pariwisata (UMKM).
2. Membangun Kawasan Industri Pariwisata Bahari dan Religi.
3. Pengembangan daya tarik Investasi dan penyederhanaan pelayanan perijinan.

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ketiga ini adalah:

1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
3. Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan

4. Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
6. Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
10. Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha
11. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
13. Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru
14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
15. Program pengembangan Pemasaran pariwisata
16. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
17. Program Pengembangan ekonomi kreatif

7.2.4. Program Unggulan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “***Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan***”, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Pengawasan Kualitas Pembangunan Infrastruktur.
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Desa.

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi keempat ini adalah:

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan
2. Program pembangunan jalan dan jembatan
3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8. Program Pengembangan Perumahan
9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
10. Program penyediaan dan pengolahan air baku

7.2.5. Program Unggulan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”***, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Meningkatkan status Puskesmas Rawat Inap menjadi BLUD.
2. Peningkatan pelayanan oleh Dokter Spesialis di Puskesmas
3. Membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah
4. Pendidikan Gratis bagi keluarga tidak mampu sampai dengan jenjang SLTA.
5. Memberikan beasiswa di Perguruan Tinggi bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kelima ini adalah:

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

8. Program Obat dan Perbekalan
9. Program Pengawasan Obat dan Makanan
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17. Program Pendidikan Non Formal
18. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
19. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
20. Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal
21. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
22. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
23. Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga
24. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

7.2.6. Program Unggulan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu ***“Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan”***, maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang menjamin masyarakat dalam berusaha
2. Menjaga stabilitas Politik dan demokrasi
3. Memberikan ruang yang luas kepada pengembangan seni dan budaya.
4. Membangun Pusat Kegiatan Kreatifitas Seni dan Budaya

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi keenam ini adalah:

1. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6. Program Penanganan Anak Terlantar
7. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
8. Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak
9. Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya
10. Program pengembangan nilai budaya
11. Program Pembinaan Kesenian Masyarakat
12. Program Pembinaan Sejarah Lokal
13. Program Keluarga Berencana
14. Program Pelayanan Kotrasepsi
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
16. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.7. Program Unggulan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu ***“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan,”*** maka program unggulan yang mendukung misi ini adalah:

1. Peningkatan produksi Pertanian dalam arti luas dan perikanan tangkap serta budidaya

2. Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan bagi masyarakat
3. Mewujudkan sumber daya manusia perikanan (nelayan), pembudidaya perikanan, dan pelaku usaha perikanan yang mandiri, berdaya saing kuat.
4. Menyediakan infrastruktur perikanan, kelautan yang berteknologi serta penyediaan dukungan finansial bagi penguatan ekonomi koperasi-koperasi nelayan.
5. Membangun sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi perikanan pantai.
6. Meningkatkan kualitas pelabuhan pendaratan dan pelelangan ikan.
7. Meningkatkan status Akademi Komunitas Negeri (AKN) Rembang menjadi perguruan tinggi perikanan dan kelautan berjenjang S1.
8. Membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) baru di Desa Pandangan Kec. Kragan
9. Revitalisasi PPI yang sudah ada agar kapasitasnya meningkat minimal 2 kali lipat.

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ketujuh ini adalah:

1. Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah
2. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
3. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
4. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha
6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
7. Program Desa Mandiri Pangan
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan sasaran dan indikatornya tersaji dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	MISI I								
1	Terwujudnya <i>Good Governance</i>	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) dan Standar operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik yang tepat fungsi dan konsisten Meningkatkan evaluasi atas efektifitas 	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Persentase kehadiran ASN tepat waktu Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment Persentase ASN yang mengikuti diklat Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja Persentase peningkatan SOP dan SPP Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	% % % % %	1,2% 70 46 8,43 60 50 25	3,7% 90 65 25 90 80 36	Fungsi penunjang urusan (Organisasi) Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsi penunjang urusan (Organisasi) Fungsi penunjang (Hukum)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan/tertib regulasi		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%	60	80	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu	%	70	100	Fungsi Keuangan Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	%	82,34	100	Fungi Pengawasan
			<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai ditindaklanjuti	%	80	85	
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	%	5,12	17,94	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penerapan <i>open government</i> dengan fokus pada 	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	85	100	Fungsi kominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi	Program kerjasama informasi dan media massa	Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	Berita	30	45	
			<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah 	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	40	80	
			<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing2 Perangkat Daerah. 	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi	%	13,3	80	
2	Meningkatnya patisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif dan meningkatkan kemitraan dengan swasta	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan terutama pada penyerapan aspirasi masyarakat, pengendalian dan evaluasi 	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%	50	75	Fungsi Perencanaan Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan intensitas 	Program Penguatan Kapasitas	Rata-rata Persentase kesesuaian Program	%	20	100	Fungsi pemberdayaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			pendampingan masyarakat pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	Kelembagaan Masyarakat	RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah				masyarakat
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan 	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%	30	60	Fungsi Perencanaan Pembangunan
3	Meningkatnya konsistinsi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Peningkatan kapasitas aparatur perencana, peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal serta peningkatan kualitas pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan 	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	70	100	
4	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas basis data perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru 	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	85	100	Fungsi Statistik
5	Terciptanya pelayanan Publik yang cepat tanggap dan Prima	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	0	100	Urusan Penunjang (Humas)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN) dan desa. 	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	2,59	50	Kecamatan dan Fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa
			<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan professional 	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persentase layanan publik berbasis TIK	%	40	80	Fungsi Kominfo
	MISI II								
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian	Revitalisasi sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah dengan mendorong kegiatan agribisnis yang ditunjang oleh ketersediaan sarana prasarana serta pertanian modern	Pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian	Program Peningkatan produksi Pertanian Program Peningkatan produksi Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produktivitas rata-rata tanaman pertanian Produktivitas rata-rata tanaman perkebunan Indeks Peningkatan Populasi Ternak Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Peningkatan kelas pelaku utama Indeks Pertanaman lahan sawah Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha ton/ha Skor Skor poktan Skor ton/ha	5,05 4,20 1,05 1,16 20 1,31 0,83	5,46 4,80 1,07 1,20 70 1,50 1,10	Urusan Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				(DBHCHT)					
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan jumlah UPJA	%	7,20	10,00	
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	%	1.60	1,50	
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI	Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya	Pengembangan perikanan budidaya secara intensif	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan Produksi ikan	Ton	4.040	27.200	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan Pemberdayaan nelayan kecil	Pengembangan pola nafkah ganda bagi nelayan kecil	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha	Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2.769	2.939	
		Meningkatkan kinerja TPI	Peningkatan pelayanan TPI secara terpadu	Program pengelolaan TPI terpadu	Nilai raman	Rp.Milyar	412,03	504,05	
3	Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	Meningkatkan ketersediaan, standarisasi perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui pengelolaan pasar tradisional dan perdagangan elektronik	Peningkatan ketersediaan, standarisasi perdagangan dan perlindungan konsumen	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kecukupan stok barang	%	60	90	Urusan Perdagangan
				Program Peningkatan Kemetrolgian dan perlindungan Konsumen	Persentase cakupan sidang tera ulang	%	70	90	
				Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%	60	90	
			Peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%	70	90	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			tradisional	Distribusi					
			Peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran	Program Promosi produk unggulan daerah	Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%	20	50	
				Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	11	66	
				Program Pengembangan Sistem Distribusi	Persentase pelaksanaan pengembangan sistem distribusi	%	10	50	
				Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	Jumlah kemitraan usaha perdagangan	jumlah	5	10	
				Program Pembinaan Pedagang	Persentase peningkatan peran serta pedagang	%	10	50	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan retribusi thd PAD	%	5	10	Fungsi Keuangan Daerah
		Mengembangkan sektor industri pengolahan berbasis usaha padat karya	Pengembangan industri skala kecil dan menengah	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio	0,88	0,95	Urusan Perindustrian
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,75	3	
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (Banlat dan Pelatihan)	Persentase penerapan teknologi industri	%	40	80	
				Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan klaster industri	Klaster	3	8	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan sentra industri	Sentra	15	50	
				Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	Persentase IKM memperoleh HAKI	%	0,2	1	
				Pembinaan Lingkungan Sosial	Pertumbuhan pelaku industry	Orang	170	200	
				Pembinaan Industri	Presentase produk unggulan memenuhi SNI	%	5	25	
3	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan peluang kerja usia produktif dan perluasan lapangan usaha di daerah	Peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga tenaga	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Orang	320	523	Urusan Tenaga Kerja
				Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	53,68	80	
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	%	75	100	
				Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	80	100	
4	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh berbasis validasi database kemiskinan	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin	Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%	70	95	Urusan Sosial
				Program Penanggulangan kemiskinan	Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	50	90	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Penguatan	Rata-rata persentase	%	5	20	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes				
			Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase desa yang membentuk BUMdes	%	6	28	
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok	34	150	Urusan Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan social	%	50	80	
			Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	6	20	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%	72	84	Urusan Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang	%	48	50	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
					menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				
				Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%	70	90	
				Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Penurunan tingkat rawan pangan	%	9	4,52	Urusan Pangan
5	Meningkatnya kualitas LH	Meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, enanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase validasi data dan informasi SLHD	%	70	90	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	10	30	
				Program Pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut	%	20,15	
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH	%	100	100	
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luasan kawasan konservasi	Ha	145	160	
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan	Persentase rehabilitasi SDA	%	30	60	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Cadangan Sumber Daya Alam					
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks kualitas LH	indeks	66,5	68,5	
				Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Lokasi pengembangan ekowisata	Lokasi	3	8	
				Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	11	
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rasio luasan RTH	rasio	0,15	0,3	
	MISI III								
1	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.	Peningkatan promosi dan kemitraan investasi	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%	20	60	Urusan Penanaman Modal
				Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Peningkatan Nilai investasi	Rp.trilyun	3,478	5	
			Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE	%	5	50	
				Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase tindak lanjut pengaduan	%	50	100	
				Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%	80	100	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%	60	80	
2	Meningkatnya Kinerja koperasi dan UMKM	Meningkatkan usaha produktif masyarakat melalui pengembangan inovasi dan kemitraan usaha.	Revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	84	94	Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase KSP / USP sehat	%	35	53	
			Peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi	%	5	10	
				Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	Persentase peningkatan pnyaluran Modal LKM koperasi dan UKM	%	10	30	
				Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase peningkatan skala usaha UMKM	%	5	10	
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Persentase UMKM kreatif	%	0,4	1	
				Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	17,4	87	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
3	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Memperkuat daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal (length of stay) dan belanja wisatawan (tourist expenditure)	Peningkatan aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kawasan DTW strategis	DTW	5	10	Urusan Pariwisata
				Program pengembangan Pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	8	45	
				Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan SDM pariwisata	pokdarwis	9	19	
				Program Pengembangan ekonomi kreatif	Penyediaan ruang kreatif	Ruang	1	6	
MISI IV									
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala, serta penanganan pemeliharaan jalan secara responsif	Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	48,98	85,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase panjang jaringan jembatan dalam kondisi baik	%	73,02	92,06	
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase drainase dalam kondisi baik	%	77,88	98,12	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	Meningkatkan pemerataan akses irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, pemantauan kondisi irigasi secara berkala, dan pemeliharaan jaringan irigasi.	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama pada lahan pertanian tadah hujan.	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	98,12	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
3	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui pembangunan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan pemerintah Pusat dan provinsi, serta pemberdayaan masyarakat	Pembangunan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni terutama pada wilayah-wilayah permukiman zona merah. Penurunan luas kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	90	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup	sehingga menjadi 0 ha atau 0%.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	7,8	0	
5	Meningkatnya cakupan akses air minum	Meningkatkan cakupan akses air minum melalui peningkatan pelayanan PDAM, PAMSIMAS dan PAB Perdesaan	Peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan akses air Minum	%	80,34	100	
6	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Meningkatkan Kepemilikan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan limbah terpadu, pemberian stimulan STOP BABS dan Sosialisasi tentang sanitasi layak	Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan sanitasi layak	%	77,42	100	
7	Meningkatnya persentase RTH	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau melalui pengadaan	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau terutama pada kawasan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH Perkotaan Publik	%	11,74	20	Urusan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		secara bertahap, penegakan aturan tata ruang, dan konservasi lahan	perkotaan						
8	Meningkatnya ketersediaan air baku	Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan embung, PPST, penggalian sumur dangkal, salinasi air laut dan optimalisasi sumber-sumber air yang ada.	Pembangunan dan pemeliharaan embung, PPST, maupun optimalisasi sumber-sumber air untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan kekeringan.	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	88	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui identifikasi pusat pertumbuhan baru, pelibatan masyarakat dan swasta secara terpadu.	Percepatan pembangunan Pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi unggulan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan terutama pada kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan pedesaan.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pusat pertumbuhan	Kawasan	0	6	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
MISI V									
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	87,5	
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa / kelurahan Univer-sal Child Immunization (UCI)	%	100	100	
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92	99	Urusan Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	Urusan Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	80	80	Urusan Kesehatan
			Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	Skor Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD	Skor	76.20	≥ 80	Urusan Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesma	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	0,26	0,26	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan	
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
				s pembantu dan jaringannya						
				Program Obat dan Perbekalan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	98	100		
				Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%	96,5		100
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	%	67,3		100
				Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77,10		92
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75		75
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	9,84		8,5
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	%	67,24		82,5
2	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Meningkatkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (3 – 6 Tahun) (PAUD)	%	72,36	96	Urusan Pendidikan	
					Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30	42		
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor	78.25	79.45		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan	
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
				Sembilan Tahun	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor	54.6	57.5		
				Program Pendidikan Non Formal	Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%	100	100		
				Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%	86,33		100
					Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	72,36		84
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	Meningkatkan pendidikan karakter dengan mengoptimalkan peran pendidik, menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal, penanaman karakter sejak dini	Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasar dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26,12	90	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
5	Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan potensi pemuda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan berjenjang	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok	0	4		
					Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	16	22		
					Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24	24		
		Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus		10	60		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan	%	22	170	
					persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi	%	32	60	
					persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional	%	0	10	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk	%	1,81	1,86	
	Misi VI								
1	Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100	100	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	8	13	
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	50	80	
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih dan partisipasi	Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol dalam pembangunan bagi masyarakat luas, dengan penekanan pada sosialisasi	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	87,6	100	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		dalam pembangunan	berkelanjutan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol						
3	Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	Peningkatan rehabilitasi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.	Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang ditangani	%	45	70	Urusan Sosial
				Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%	63	70	
				Program Penanganan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak-anak terlantar	%	60	90	
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	28	30	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%	10	100	
				Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak	Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%	100	100	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan		
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
5	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Pelestarian cagar budaya daerah	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%	26	60	Urusan Kebudayaan		
					Persentase cagar budaya yang direvitalisasi	%	4	9			
					Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jumlah	1	5			
		Pelestarian serta pengembangan kembali kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan generasi muda dan pelaku budaya untuk melestarikan dan mengembangkan kembali kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Organisasi	5	13			
					Program pengembangan nilai budaya	persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%	58		70	
						Program Pembinaan Kesenian Masyarakat	Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Kelompok		311	341
						Program Pembinaan Sejarah Lokal	Dokumentasi sejarah lokal	Dok		2	7
6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan KB, mengurangi dropp out KB dan mengurangi unmet need,	Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan focus pada penurunan unmet need dan pelayanan kontrasepsi masyarakat	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	100	100	Urusan Kebudayaan		
					Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,07	2			
				Program Pelayanan Kotrasepsi	Angka Drop out KB	%	13,62	9			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
7	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi intensif, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan focus pada pelayanan akte kelahiran bagi bayi yang belum berakte dan pelayanan KTP	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP	%	87,52	100	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
	MISI VII								
1	Meningkatnya kemandirian dalam ketahanan pangan daerah	Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan daerah di lintas sector	Penguatan lembaga ketahanan pangan daerah	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah	Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah	2	10	Urusan Pangan
		Meningkatkan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangan daerah	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/kapita/hari	5.280	7.330	
			Peningkatan akses dan distribusi pangan	Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Nilai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	nilai	46,58	70,86	
		Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan harapan	Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Skor PPH	skor	86,9	88,3	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil produksi pertanian dan perikanan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan skala kecil	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha	Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%	10	30	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	10	60	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan skala rumah tangga	Penyaluran sarana produksi pertanian dan perikanan skala kecil pada masyarakat	Program Desa Mandiri Pangan	Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil	%	2	15	Urusan Pangan
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala kecil	%	1	10	Urusan Kelautan dan Perikanan